



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PENGAWASAN HAKIM MELALUI *CIVIL SOCIETY***

TESIS

**ARIS PURNOMO
NPM. 0706187016**

**PROGRAM PASCA SARJANA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
D E P O K
JANUARI 2 0 1 1**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM
PENGAWASAN HAKIM MELALUI *CIVIL SOCIETY***

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains (M.Si)**

**ARIS PURNOMO
NPM. 0706187016**

**PROGRAM PASCA SARJANA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
D E P O K
JANUARI 2 0 1 1**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aris Purnomo

NPM : 0706187016

Tanda Tangan:

Tanggal : 3 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Aris Purnomo
NPM : 0706187016
Program Studi : Sosiologi
Judul Tesis : Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Melalui *Civil Society*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Lugina Setyawati, Ph.D ()

Sekretaris Sidang : Lidya Triana, M.Si ()

Pembimbing : Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D ()

Penguji Ahli : Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.D ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 3 Januari 2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini

Saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 3 Januari 2011

(Aris Purnomo)



Untuk Siapa saja yang melawan mafia peradilan

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala Anugerah, Berkah dan Rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Departemen Sosiologi Program Pascasarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, bukan merupakan hal yang mudah bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Berbekal semangat dan dorongan teman-teman pada akhirnya saya mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Sekali lagi saya nyatakana bahwa dukungan luar biasa dari orang-orang sekitar saya, mulai dari awal perkuliahan hingga akhirnya tesis ini dapat berwujud. Kepada mereka yang saya sebutkan berikut maupun kepada para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya haturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya:

1. Meuthia Ganie-Rochman, Ph.D sebagai pembimbing yang selalu mendorong dan mengingatkan hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan tesis ini;
2. Iwan Gardono Sujatmiko, Ph.D sebagai Penguji Ahli yang telah memberikan masukan yang kritis dan membangun;
3. Lugina Setyawati, Ph.D sebagai Ketua Program Pascasarjana Sosiologi sekaligus penguji tesis, trima kasih atas semua ilmu sosiologinya;
4. Lidya Triana, M,Si sebagai sekretaris pascasarjana sosiologi, yang telah banyak membantu dalam kelancaran kegiatan akademis;
5. Dr. der Soz. Rochman Achwan, M.D.S sebagai pembimbing *reading course*, yang telah banyak memberikan ilmu dan semangatnya;
6. Dr. M. Busyro Muqqodas, S.H., M.Hum sebagai Ketua Komisi Yudisial yang kini menjadi Ketua KPK hanya setahun;

7. Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H. sebagai salah satu tokoh dan pelopor dalam gerakan antikorupsi dan reformasi peradilan di Indonesia. Pengalaman dan pemikiran Mas Bambang menjadi inspirasi peneliti;
8. Bapak Baharuddin TM, S.H. ayahanda sekaligus ”*funder*” saya yang selalu ingin anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Gelar ini buat menggantikan kesempatan yang Anda ”korkbankan” dulu.
9. Ibu Soeherna Sjam, ibunda saya yang selalu mengajarkan untuk senantiasa melakukan segala sesuatu dengan rinci dan teratur serta senantiasa menolong sesama.
10. Iva dan Abel, yang selalu pertama dan menyita perhatian dalam hidup saya. Terima kasih untuk semuanya.
11. Yahwa Tata dan Titi, Tete Mut yang selalu menemani Abel, juga Mba Elok yang banyak membantu;
12. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar meneruskan sekolah. Buat keluarga di Ponorogo Bapak Niwat, Ibu Rubijati, Mba Tutik, Mas Heri, Mas Edi, Mba Lina, dan Puspito dan Wida yang baru membina keluarga, serta Shabrina yang beranjak dewasa. Mas Tugas dan Mba Dewi di Cijantung juga Joko dan Rini di Sewon Bantul;
13. Seluruh dosen pengajar sejak awal perkuliahan. Rekan-rekan staf administrasi dan perpustakaan Program Pascasarjana Sosiologi: Mbak Rini, Mbak Iled, Mas Santoso, dan Mas Agus.
14. Rekan-rekan angkatan 2007 di Magister Sosiologi. Terima kasih untuk kebersamaan selama dua, tiga tahun ini.
15. Bapak Muzayyin Mahbub, dan jajaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang telah bersama-sama membangun Komisi Yudisial seperti sekarang ini.
16. Rekan-rekan investigator Komisi Yudisial, Magic Narwanto, Abdul Mukti, Syarif, dan Riski yang memulai ”babat alas” jejaring Komisi Yudisial, juga seluruh teman-teman di Biro Investigasi dan Pengendalian Internal Komisi Yudisial;
17. Rekan-rekan *Task Force* Musleh dan Banong bersama kalian, memperjuangkan ”menangkap angin” mafia peradilan. Kalian provokator dan promotor yang tidak kenal lelah;

18. Rekan-rekan staf di desk Posko Pemantauan Peradilan Komisi Yudisial, Pak Edi, Pak Kardi, Pak Hamka, Ibu Mia, dan saudara Tunta, serta staf di Komisi Yudisial yang tidak bisa disebut satu persatu.
19. Rekan-rekan di Koalisi Pemantau Peradilan, bersama kalian semangat dan idealisme selalu terjaga;
20. Rekan-rekan jejaring Komisi Yudisial, tanpa kalian perjuangan ini tidak berjalan dan tidak berarti; dan
21. Semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, terima kasih banyak yang tak terhingga.

Saya berharap agar penelitian ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan untuk melangkah mewujudkan peradilan bersih. Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.

Depok, 3 Januari 2011

Penulis

Aris Purnomo

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Purnomo

NPM : 0706187016

Program Studi : Sosiologi

Departemen : Sosiologi

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Melalui *Civil Society*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok

Pada tanggal : 3 Januari 2011

Yang menyatakan

Aris Purnomo

ABSTRAK

Nama : Aris Purnomo
Program Studi : Sosiologi
Judul : Penguatan Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim
Melalui *Civil Society*

Tesis ini membahas upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam penguatan peran pengawasan hakim melalui masyarakat sipil (*civil society*). Jaringan kerja (jejaring) Komisi Yudisial merupakan kekuatan Komisi Yudisial untuk memperkuat peran pengawasan hakim sekaligus modal sosial dalam implementasi berbagai kebijakan dan program/ kegiatan. Kelemahan dan kendala yang dihadapi Komisi Yudisial diantisipasi dengan melakukan kerjasama dengan jejaring untuk memperkuat posisi dan peran dalam pengawasan hakim.

Kata kunci:

Komisi Yudisial, jaringan kerja (jejaring), penguatan, pengawasan hakim, *civil society*

ABSTRACT

Nama : Aris Purnomo
Study Program: Sociology
Title : Strengthening Role of Supervisory Judge Of Judicial
Commission in Through Civil Society

This thesis describes the efforts of the Judicial Commission in through civil society. Networks is the strength of the Judicial Commission Judicial to strengthen the supervisory role of judges as well as social capital in the implementation of various policies and programs / activities. Weaknesses and constraints faced by the Judicial Commission is anticipated to conduct cooperation with the network to strengthen the position and role in the supervision of judges.

Key words:

Judicial Commission, networking, strengthen , judge supervisory, civil society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I.

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	5
1.5. Signifikansi Penelitian.....	6
1.6. Keterbatasan Penelitian.....	7

BAB II. TINJAUAN

PUSTAKA.....	8
2.1.Perspektif Sosiologis Mengenai Jaringan Kerja (<i>Networking</i>)	8
2.2.Agen dan Kohesivitas dalam Jaringan.....	15
2.3.Organisasi Sektor Publik.....	18
2.4.Perkembangan Organisasi Sektor Publik.....	20

BAB III. METODOLOGI

PENELITIAN.....	24
3.1. Pendekatan Penelitian.....	24
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	24
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4. Informan Penelitian.....	26
3.5. Triangulasi Pengumpulan Data.....	29
3.6. Peran Peneliti.....	29
3.7. Hubungan Peneliti dan Subjek Penelitian.....	30
3.8. Teknik Analisa Data.....	31

3.9. Sistematika Penulisan.....	33
BAB IV. EKSISTENSI KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA.....	34
4.1.Latar Belakang Komisi Yudisial.....	34
4.2.Lembaga Semacam Komisi Yudisial di Negara Lain.....	44
4.3.Dasar Hukum dan Posisi Komisi Yudisial.....	47
4.3.1. Dasar Hukum Pembentukan Komisi Yudisial.....	47
4.3.2. Komisi Yudisial sebagai <i>State Auxiliary Institution</i>	49
4.3.3. Tujuan, Visi dan Misi Komisi Yudisial.....	51
4.3.4. Struktur Komisi Yudisial.....	54
4.3.4.1. Struktur Anggota Komisi Yudisial.....	54
4.3.4.2. Struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.....	55
4.4. Struktur Komisi Yudisial yang Dinamis.....	59
4.5. Pola Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.....	71
4.6. Beberapa Peristiwa Penting pada Komisi Yudisial.....	74
BAB V PENGUATAN PERAN KOMISI YUDISIAL MELALUI JEJARING.....	84
5.1. Jejaring Komisi Yudisial dalam Perspektif Sosiologis.....	84
5.2. Urgensi Jejaring bagi Komisi Yudisial.....	101
5.3. Organisasi Komisi Yudisial.....	125
5.4. Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial.....	137
5.5. Beberapa Catatan Problem Organisasi Dalam Pengawasan Hakim....	47
BAB VI. PENUTUP.....	150
6.1. Kesimpulan.....	151
6.1.1 Implikasi Teoritis.....	139
6.1.2 Rekomendasi.....	157

DAFTAR REFERENSI

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Otonomi Birokrasi menurut Carpenter	14
Tabel 2 Jumlah Putusan Yang Diteliti	104
Tabel 3 Pemantauan Sidang yang dilakukan Komisi Yudisial	135
Tabel 4 Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang Sudah Digelar	136

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Variabel Kontektual, Jaringan Dinamis, dan Capaian.....	11
Bagan 2 Struktur Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	58
Bagan 3 Variabel Kontektual, Jaringan Dinamis, dan Capaian antara Komisi Yudisial dengan Jejaring.....	86

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Pengaduan Masyarakat Yang Diregistrasi	128
Diagram 2 Penanganan Berkas laporan yang dapat ditindaklanjuti	130
Diagram 3 Jumlah Pemeriksaan Terhadap Hakim dan Pelapor/ Saksi.....	130
Diagram 4 Jumlah Hakim yang Direkomendasikan ke Mahkamah Agung.....	131
Diagram 5 Rekomendasi Sanksi Yang Diusulkan Ke Mahkamah Agung	117

DAFTAR SINGKATAN

No	Singkatan	Kepanjangan dari
1	APH	Aparat Penegak Hukum
2	BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3	BAWASLU	Badan Pengawas Pemilu
4	BIPI	Biro Investigasi dan Pengendalian Internal
5	BPK	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
6	CSO	<i>Civil Society Organization</i>
7	DP3	Daftar Penilaian Penyelesaian Pekerjaan
8	DPD	Dewan Perwakilan Daerah
9	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
10	HAM	Hak Asasi Manusia
11	HUBLA	Hubungan Antar Lembaga
12	ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
13	IDR	Institute for Development Research
14	IKAHI	Ikatan Hakim Indonesia
15	KEPPH	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
16	KHN	Komisi Hukum Nasional
17	KKN	Korupsi Kolusi dan Nepotisme
18	KORBID	Koordinator Bidang
19	KPU	Komisi Pemilihan Umum
20	KPP	Koalisi Pemantau Peradilan
21	KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
22	KRHN	Konsorsium Reformasi Hukum Nasional
23	KY	Komisi Yudisial Republik Indonesia
24	LBH	Lembaga Bantuan Hukum
25	LEIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
26	LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
27	LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
28	MA	Mahkamah Agung Republik Indonesia
29	MAPPI FHUI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia
30	MK	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
31	MKH	Majelis Kehormatan Hakim
32	MOU	<i>Memorandum of Understanding</i> (nota kesepahaman)
33	MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
34	MTI	Masyarakat Transparansi Indonesia
35	NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
36	NPM	<i>New Public Management</i>
37	OKP	Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda
38	Ormas	Organisasi Masyarakat
39	Ornop	Organisasi Non Pemerintah
40	PAH	Panitia <i>Ad Hoc</i>

41	PDLI	Pusat Data dan Layanan Informasi
42	PNS	Pegawai Negeri Sipil
43	PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
44	SEKJEN	Sekretaris Jenderal
45	SKB	Surat Keputusan Bersama
46	TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
47	TI	<i>Transparency International</i> Indonesia
	INDONESIA	
48	TUADA	Ketua Muda
49	UU	Undang-undang
50	UUD 1945	Undang Undang Dasar Tahun 1945
51	WASKIM	Pengawasan Hakim



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Ketua Komisi Yudisial

Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Koordinator Bidang Pengawasan
Hakim

Lampiran 4 Transkrip Wawancara dengan Bambang Widjojanto

Lampiran 5 Transkrip Wawancara dengan Sjaiful Rachman

Lampiran 6 Jawaban Tertulis Jejaring dari Pekanbaru

Lampiran 7 Jawaban Tertulis Jejaring dari Samarinda

Lampiran 8 Jawaban Tertulis Jejaring dari Medan

